

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang diberikan kewenangan atau hak untuk mengatur dan mengurus kebijakan dalam rangka menjalankan kepengurusan pemerintahan. Salah satu yang menjadi tugas dari pemerintah yakni melayani kebutuhan dari masyarakat dan juga menciptakan peluang yang bisa digunakan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah dituntut untuk memberikan sebuah pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Suatu pertumbuhan ekonomi dalam daerah bisa dijadikan sebuah indikator yang digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah. Dimana pertumbuhan ekonomi daerah juga dapat dilihat dari tingkat kenaikan dari pendapatan daerah atau tingkat pertambahan dari produksi daerah baik itu berupa barang maupun jasa(Ningsih, Wahyusa, Febria, Sulistiawati, & Ardiantho, 2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Karena tidak semua

pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara mereka akan mengandalkan informasi keuangan itu untuk membuat keputusan, maka ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran kinerja sektor publik sangatlah penting karena bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pentingnya penyandingan antara anggaran dengan realisasinya untuk menunjukkan tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk mengetahui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Kupang maka hal tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan analisis pendapatan dan analisis belanja. Untuk menganalisis pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Kupang secara umum terlihat dari laporan realisasi anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang disusun secara terstruktur yang di dalamnya memuat informasi realisasi pendapatan, belanja serta pembiayaan selama periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, mengindikasikan derajat pencapaian sasaran-sasaran yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara eksekutif dengan legislative.

Pengukuran kinerja tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibanding dengan yang telah direncanakan. Publikasian laporan realisasi anggaran oleh pemerintah daerah akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat, karena dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah (Afnan, 2020).

Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Kupang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya

desentralisasi sistem pemerintahan pada Kabupaten Kupang, karena itu Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kabupaten Kupang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya penyelewengan-penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintahan pada masa kekuasaan sebelumnya membuat masyarakat geram dan krisis kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kupang, untuk itu masyarakat atau penduduk sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kupang, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kabupaten Kupang apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Salah satu instrument yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, masyarakat atau publik merupakan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan

amanat rakyat kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Penyelenggaraan anggaran daerah memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif, namun harus merupakan suatu kebersamaan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam arti luas (meliputi perwakilan dari warga, pemuka adat, tokoh masyarakat, kalangan akademisi dan LSM). Kesadaran bahwa penyelenggaraan anggaran daerah merupakan amanat rakyat menjadi sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini berlokasi di Kota Oelamasi mulai 22 Oktober 2010, setelah sebelumnya berlokasi di Kota Kupang sejak tahun 1958. Kabupaten Kupang memiliki potensi pendapatan asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk membiayai APBD nya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Kupang dengan menggunakan Analisis Varians Dan Pertumbuhan Untuk Mengukur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang. Berikut adalah Realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten Kupang tahun anggaran 2018-2021 dapat dilihat dalam tabel 1.1 dibawah ini:

**Tabel 1. 1**

**PERTUMBUHAN PENDAPATAN KABUPATEN KUPANG 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	1.236.846.999.491,25	-	-
2019	1.266.901.145.258,64	30.054.145.767,39	2,37
2020	1.175.919.425.857,51	(90.981.718.401,13)	(7,73)
2021	1.161.477.530.683,75	(14.441.895.173,76)	(1,24)
2022	1.177.680.968.126,55	16.203.437.442,8	1,37

Sumber: APBD Kabupaten Kupang, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten kupang, pada tahun 2019 Kabupaten kupang mengalami peningkatan dengan selisih dari tahun 2018 sebesar Rp30.054.145.767,39 dengan presentase 2,37%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan selisih pendapatan negatif dari tahun 2019 sebesar - Rp90.981.718.401,13 dengan presentase 7,73%. Namun pada tahun 2021 APBD kabupaten kupang mengalami penurunan lagi dengan selisih pendapatan negatif dari tahun 2020 sebesar-Rp14.441.895.173,76 dengan presentase 1,24%. Dan pada tahun 2022 APBD Kabupaten Kupang mengalami kenaikan lagi dengan selisih pendapatan dari tahun 2021 sebesar Rp16.203.437.442,8 dengan persentase 1,37%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah kabupaten kupang tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif.

**Tabel 1. 2**

**PERTUMBUHAN BELANJA KABUPATEN KUPANG TAHUN 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja(Rp)</b>	<b>Pertumbuhan (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2018	1.221.688.581.122,00	-	-
2019	1.121.863.528. 921,00	(99.824.998,201)	(8,89)
2020	1.149.587.557.091,39	27.724.028.170,39	2,41
2021	1.185.890.563.525,37	36,303.006.433,98	3,86
2022	1.016.249.755.505,87	(169.640.808.019,5)	(1,66)

Sumber: APBD Kabupaten Kupang, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah kabupaten kupang, Pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan selisih negatif dari tahun 2018 sebesar -Rp99.824.998,201 dengan presentase 8,89%, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan selisih dari tahun 2019 sebesar Rp27.724.028.170,39 dengan presentase 2,41%. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan belanja selisih tahun 2020 sebesar Rp36,303.006.433,98 dengan presentase 3,86%. Dan pada tahun 2022 APBD Kabupaten Kupang mengalami penurunan dengan selisih belanja dari tahun 2021 sebesar -Rp169.640.808.019,5 dengan persentase 1,66. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belanja daerah kabupaten kupang tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif.

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini diteliti oleh Yolanda Afri Liyani, Vara Tiska Luthfita Desanti Putri Suharto, Risma Wira Bharata (2023) dengan judul penelitian “Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada

Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018-2021”, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis varians belanja, ditemukan bahwa terdapat selisih rata-rata sebesar 26,7, sedangkan rata-rata penggunaan atau penyerapan anggaran belanja mencapai 73,14%. berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah dapat dinilai cukup baik dalam hal perencanaan anggaran dan upaya penggunaan anggaran yang efektif. hasil dari analisis varians ini juga menunjukkan bahwa penggunaan anggaran lebih dari 90% menandakan penggunaan anggaran yang efisien, sementara penggunaan di bawah 90% dapat mengindikasikan adanya kekurangan dalam perencanaan anggaran. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam analisis data belanja daerah.

Dan penelitian ini juga di teliti oleh Christian Kainde (2013), dengan judul penelitian Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pemerintah Kota Bitung mempunyai prosedur penyusunan anggaran yang baik, tetapi dalam pelaksanaan masih kurang efektif, dilihat dari hasil penelitian dapat diketahui terdapat selisih negatif antara Realisasi Belanja dan Anggaran Belanja Daerah, dimana Relisasi Belanja lebih kecil dari Anggaran Beanja yang sudah ditetapkan. 2. Dari hasil penelitian pertumbuhan belanja daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan belanja setiap tahunnya, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan perubahan kurs dan harga minyak.



Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Varians Dan Pertumbuhan Untuk Mengukur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah Varians dan Pertumbuhan untuk mengukur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

1. Seberapa besar varians realisasi pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang?
2. Seberapa besar varians realisasi belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang?
3. Seberapa besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang?
4. Seberapa besar pertumbuhan realisasi belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang?

## **1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk menganalisis varians realisasi pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

- b) Untuk menganalisis variansi realisasi belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.
- c) Untuk menganalisis pertumbuhan realisasi pendapatan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.
- d) Untuk menganalisis pertumbuhan realisasi belanja daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang Analisis Variansi Dan Pertumbuhan Untuk Mengukur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Manajemen selain itu peneliti juga punya keinginan untuk mengetahui bagaimana varians dan pertumbuhan untuk mengukur anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kupang.

2. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai varians dan pertumbuhan untuk mengukur anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kupang.